

HARIAN
UNTUK UMUM

TERBIT SEJAK
01 MARET 2011

PENDIRI:
Ardi, S.Si, Apt

BUTON, BUTENG, BUSEL, BUTUR, WAKATOBI, MUNA, MUBAR, KOLAKA
BOMBANA, KENDARI, BAUBAU

Baubau Post

Baubaupost.com

KORAN NOMOR SATU DI KEPULAUAN BUTON

Rabu
04 Desember 2024

Eceran Rp 5000

Berlangganan Rp 100.000/ bulan

Info Langganan dan Iklan HP/WA: 082160543989

Pj walikota Baubau Dr H Muh Rasman Manafi: Pilkada Usai, Saatnya Perkuat Fondasi Birokrasi



Laporan: Ardi, Baubau Post, Durasi Times

BAUBAU, BP-Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kota Baubau baru saja selesai setelah KPU Kota Baubau melaksanakan pleno hasil perhitungan suara pada Senin (2/12/2024). Dengan selesainya perhelatan lima tahun sekali tersebut maka sekarang ini yang harus dilakukan adalah memperkuat fondasi birokrasi untuk menjemput Wali Kota Baubau yang definitif.

Hal ini diungkapkan Pj Wali Kota Baubau Dr H Muh Rasman Manafi, SP, M.Si saat rapat evaluasi dan pengendalian pembangunan di ruang rapat

Lanjutkan ke Hal: 7

Pemkot Baubau Gelar Upacara Hari Korpri, Hari Guru Nasional dan PGRI Tahun 2024



Laporan: Andina L

BAUBAU, BP- Sege- nap Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pem- kot Baubau mengikuti

upacara bendera mem- peringati Hari Ulang Ta- hun ke-53 Korpri yang dirangkaikan dengan

Lanjutkan ke Hal: 7

Pemkot Baubau Antisipasi Potensi Pergesekan Pasca Pelaksanaan Pilkada

BAUBAU, BP-Pemer-intah Kota (Pemkot) Bau- bau mulai mengantisipasi potensi pergesekan pasca tahapan pencoblosan Pe- milihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur dan Wakil Gubernur Sul- tra serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Baubau



Pj Walikota Baubau Dr H Muh Rasman Manafi

Lanjutkan ke Hal: 7

Rekomendasi Dokumen Penelitian Bisa Menjawab 8 Percepatan Penanganan Kondisi Daerah



Laporan: Amat Jr

BAUBAU, BP-Badan Penelitian dan Pengemban- gan Daerah (Balitbangda) Kota Baubau menggelar

seminar evaluasi hasi- hasil penelitian bidang sosial, budaya, ekonomi

Lanjutkan ke Hal: 7

FESTIVAL OLAH RAGA TRADISIONAL (FORTRAD) TINGKAT KOTA BAUBAU 2024
Baubau, 29 November s.d 3 Desember 2024
Ayo Berolahraga - Bersatu Kita Juara



SEGENAP PIMPINAN, REDAKSI, & KARYAWAN PT FAREN GRAFIKA
PENERBIT SURAT KABAR HARIAN (SKH) BAUBAU POST (www.baubaupost.com)

Mengucapkan :

Terimakasih Kepada Dewan Pers Yang Menetapkan SKH Baubau Post
(www.baubaupost.com) Sebagai Media Terverifikasi
per Tanggal 30 Desember 2022



Pj walikota Baubau Dr H Muh Rasman Manafi: Pilkada Usai, Saatnya Perkuat Fondasi Birokrasi

rapat kantor Wali Kota Baubau Senin (2/12/2024).

Saat ini menurut orang nomor satu di Kota Baubau tidak usah lagi terbawa sampai berdebat dengan tim sukses tentang pembangunan Kota Baubau. Dan pihaknya sedang mengupayakan nanti setelah sidang pleno KPU Kota Baubau akan mengundang pemenang Pilkada dengan melakukan

pertemuan dengan birokrasi Pemkot Baubau. Pada pertemuan tersebut juga akan disampaikan apa yang sudah dikerjakan dan masih banyak yang akan dilanjutkan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Baubau yang definitif.

Dr H Muh Rasman Manafi berharap komunikasi yang dibangunnya tersebut merupakan salah satu bagian untuk

mencairkan komunikasi antara birokrasi dengan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Baubau yang terpilih.

Pemkot Baubau sudah punya rencana kegiatan tahun 2025 dan untuk OPD-OPD yang sekiranya perlu diselenggarakan dengan visi misi kepala daerah terpilih untuk diberikan masukan ke tim TAPD atau dikomunikasikan ke Bappeda agar tidak

menjadi penundaan untuk kepala daerah terpilih. "Lebih bagus kita selaraskan. Karena kalau itu tidak kita lakukan maka kita akan menunggu lagi di perubahan anggaran sementara kebutuhan masyarakat yang sifatnya layanan itu banyak dianggarkan di anggaran murni triwulan I dan triwulan II," ungkapnya. (*)

Pemkot Baubau Gelar Upacara Hari Korpri, Hari Guru Nasional dan PGRI Tahun 2024



Hari Guru Nasional tahun 2024 dan peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) tingkat Kota Baubau di halaman kantor Wali Kota Baubau Palagimata, Senin (2/12/2024). Upacara juga diikuti pejabat Pemkot Baubau, guru, kepala sekolah, dan perwakilan pelajar se-Kota Baubau.

Dalam amanat Presiden RI Prabowo Subianto, yang dibacakan Pj Wali Kota Baubau Dr H Muh Rasman Manafi, SP, M.Si menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada keluarga besar KORPRI yang selama lebih dari setengah abad telah memberikan pengabdian terbaik dengan loyalitas dan dedikasi tinggi kepada bangsa dan negara.

"Mari kita dukung program-program pemerintah yang selalu berorientasi pada kesejahteraan rakyat Indonesia dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Korpri akan bertransformasi menjadi Korps Pegawai ASN Republik Indonesia dengan tujuan utama untuk memperkuat jiwa Korps ASN sebagai pemersatu bangsa. Saya berharap Korpri menjadi satu-satunya organisasi yang menaungi ASN sehingga tidak ada dualisme dalam pembinaan ASN dan menjadi wahana mempercepat penyebaran informasi program pemerintah kepada masyarakat. Saya juga mengajak seluruh Dewan Pengurus Korpri di pusat maupun daerah untuk mengaktifkan kem-

bali seluruh program dan kegiatan Korpri sejalan dengan tujuan besar organisasi ini," ujarnya.

Presiden RI Prabowo juga mendorong percepatan penerbitan peraturan pemerintah tentang Korpri sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang ASN guna meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi seluruh ASN. Anggota Korpri yang saya banggakan, Korpri merupakan bagian integral dari pemerintahan dan harus terus menerus diperkuat. Sebagai komponen strategis bangsa, Korpri berperan sebagai perkat dan pemer satu bangsa. Oleh karena itu, diminta agar Korpri tetap diakomodasi dalam kedinasan sehingga aspirasi ASN dapat ditampung dan disalurkan secara proporsional dan profesional untuk mendukung tugas-tugas pemerintahan. ASN harus selalu menjunjung tinggi prinsip netralitas dan tetap setia kepada negara siapapun pemimpinnya.

Sementara itu, ditempat yang sama Pj Wali Kota Baubau Dr H Muh Rasman Manafi, SP, M.Si juga membacakan sambutan Menteri Pendidikan yakni hari guru tahun 2024 mengamobil tema guru hebat indonesia kuat. Tema tersebut memiliki tiga makna. pertama, penegasan tentang arti dan kedudukan penting para guru. sesuai undang-undang guru dan dosen nomor 14/2005, guru adalah pendidik profesional yang bertugas mengajar, mendidik, membimbing, dan menilai hasil belajar para murid. Kedua, guru tidak hanya berperan sebagai agen pembela-

jaran, tetapi juga agen peradaban. para guru berperan mendidik para murid sehingga memiliki kecerdasan, keterampilan, dan karakter yang mulia. ketiga, guru menentukan kualitas sumber daya manusia, generasi bangsa yang melanjutkan perjuangan dan bertanggung jawab memajukan bangsa dan negara. guru yang hebat menentukan kualitas pembelajaran kualitas lulusan, dan kualitas sumber daya manusia.

Sejalan dengan visi pendidikan bermutu untuk semua, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berusaha meningkatkan kualitas para guru melalui tiga program prioritas. pertama, pemenuhan kualifikasi guru. terdapat ratusan ribu guru yang belum berpendidikan diploma IV atau strata 1. secara bertahap, kementerian berusaha memberikan kesempatan bagi para guru untuk dapat melanjutkan studi.

Kedua, meningkatkan kompetensi guru tidak terbatas pada kompetensi akademik, pedagogik, moral, dan sosial tetapi juga kewirausahaan, dan kepemimpinan melalui berbagai pelatihan. dalam rangka memperkuat pendidikan karakter dan akhlak mulia, kementerian mulai memberikan pelatihan bimbingan konseling dan pendidikan nilai bagi para guru kelas dan guru bidang studi. Ketiga, kementerian berusaha meningkatkan kesejahteraan guru melalui sertifikasi baik bagi guru ASN, PNS dan PPPK, maupun non-ASN. dengan peningkatan kesejahteraan, para guru diharapkan dapat meningkatkan dedikasi dan kualitas pembelajaran. (*)

Rekomendasi Dokumen Penelitian Bisa Menjawab 8 Percepatan Penanganan Kondisi Daerah

dudukan Kamis (28/11/2024). Harapan utama Pemkot Baubau terkait dengan kegiatan seminar evaluasi hasil-hasil kajian/penelitian adalah hasil rekomendasi dokumen penelitian bisa menjawab delapan fokus percepatan penanganan kondisi daerah yakni, penanganan kemiskinan ekstrim, penurunan stunting, pengendalian inflasi daerah, penggunaan produk dalam negeri dan inovasi daerah, percepatan izin investasi, prioritas dan pemetaan potensi, penyuksesan pemilu dan kondusifitas kerukunan sosial daerah.

"Dan untuk mewujudkan semuanya itu mari bekerja bersama dalam menuntaskan semua masalah. kegiatan seminar evaluasi hasil-hasil penelitian bidang sosial budaya dan ekonomi Balitbangda Kota Baubau dengan tema urgensi riset dan inovasi daerah untuk peningkatan literasi publik, penguatan kohesitas sosial, dan peningkatan daya saing daerah," ujar Pj Wali Kota Baubau Dr H Muh Rasman Manafi, SP, M.Si saat membuka kegiatan seminar evaluasi hasil-hasil penelitian bidang sosial, budaya ekonomi dan

kependudukan.

Menurut orang nomor satu di Kota Baubau ini, kajian atau penelitian yang baik harus memenuhi beberapa kriteria. mengevaluasi hasil-hasil penelitian /riset berarti menilai hasil penelitian tersebut sesuai dengan kriteria yang baik. Hasil kajian/ penelitian akan bermanfaat atau dapat memberi kontribusi terhadap kebutuhan ilmiah dan kebutuhan praktis, jika dianalisis dengan teknik ilmiah yang relevan dengan tujuan penelitian.

Indikator utama dari penelitian yang sukses adalah bahwa

hasil penelitiannya dapat diterapkan, dan hasil aplikasinya baik secara langsung atau tidak langsung meningkatkan efisiensi, produktivitas atau keberlanjutan (garforth c, 1998). secara jelas, hasil akhir suatu penelitian harus disebarluaskan kepada semua stakeholder.

"Pada saat seminar hari ini penting sekali untuk merefleksi kinerja Balitbangda untuk mengetahui sudah seberapa banyak judul penelitian yang sudah dilaksanakan dan hasil-hasil inovasi yang sudah dilaporkan dan kiat-kiat dari Balitbangda," ungkapnya. (*)

Pemkot Baubau Antisipasi Potensi Pergesekan Pasca Pelaksanaan Pilkada

bau dengan menggelar rapat koordinasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintah daerah pasca pelaksanaan Pilkada di rujab Wali Kota Baubau Rabu malam (27/11/2024 dan dipimpin langsung oleh Pj Wali Kota Baubau Dr H Muh Rasman Manafi, SP, M.Si

Dalam arahannya, Pj Wali Kota Baubau Dr H Muh Rasman Manafi mengungkapkan, untuk Kota Baubau ada 4 kecamatan yang perlu penanganan langsung. Oleh sebab itu, hal-hal yang memungkinkan adanya PSU benar-benar ditekan dan ini menjadi pesan Gubernur Sultra terkait prestasi Kota Baubau yang

lalu pada saat Pileg dengan angka partisipasi 81 persen diupayakan dipertahankan. Begitu juga dengan potensi PSU atau potensi pergesekan pasca pencoblosan, karena pergesekan itu bisa jadi euphoria indikasi menang atau kekecewaan itu bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.

Pada kesempatan tersebut, orang nomor satu di Kota Baubau juga menyampaikan arahan Pj Gubernur Sultra yang menjadi perhatian adalah lebih pada upgrade informasi dimana poin pertama diminta kepada semua kepala daerah di dampingi dengan

Kesbangpolnya dan para Asisten untuk menyiapkan laporan berkala yang langsung dikirim ke nomor HP Pj Gubernur Sultra. Karena itu, kepada Sekda, Asisten dan Kesbangpol untuk melaporkan kalau hal-hal yang sudah selesai tidak perlu di laporkan cukup secara umum saja. Bahwa misalnya telah terkendali atau telah selesai perhitungan akan tetapi yang di butuhkan laporan ke Pj Gubernur itu adalah hal-hal yang perlu ada penanganan oleh pihak keamanan atau penyelenggara Pemilu yang harus disupport.

Ditambahkan, ASN dan semua Pj Wali Kota dan Bupati juga diminta untuk membagikan informasi atau mendengarkan informasi terkait dengan langkah-langkah yang sudah diambil selama ini. Kalau perlu ada perbaikan disampaikan untuk lebih mencairkan lagi suasana, karena menjelang Pilkada pasti naik tensinya dan diupayakan di ASN ini setelah pencoblosan dan sudah tugasnya namun baiknya mendahului menciptakan suasana solid dan saling merangkul. (*)

2 PEMERINTAHAN-PARLEMEN-PILKADA

Rabu, 04 Desember 2024

Baubau Post

<https://www.baubaupost.com>

Komisi II DPR Soroti Kotak Kosong Menang di Pilkada: Tidak Masuk Akal



Ilustrasi. Kampanye gerakan Kotak Kosong di Surabaya beberapa waktu lalu.

Laporan: Hadi

JAKARTA- Anggota Komisi II DPR Ahmad Irawan menyoroti kemenangan kotak kosong berdasarkan hasil hitung cepat di sejumlah wilayah yang diikuti paslon kepala daerah tunggal pada pelaksanaan Pilkada serentak 2024.

Irawan menilai kemenangan kotak kosong sebagai anomali dan tidak masuk akal. Menurut dia, fenomena tersebut perlu dicermati dan mendapat perhatian serius.

"Jadi adanya fenomena kotak kosong, apalagi kotak kosong yang kemudian menang dalam pemilihan merupakan suatu anomali dan tidak masuk akal (absurd). Menangnya kotak kosong

merupakan suatu dinamika sosial politik yang harus dicermati," kata Irawan dalam keterangannya, Senin (2/12).

Politikus Partai Golkar itu misalnya menyoroti calon tunggal paslon Maulan Aklil (Mole) dan Masagus M Hakim di Pilwalkot Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan hasil hitung cepat, paslon tunggal itu hanya memperoleh 35.177 suara atau 41 persen. Sementara kotak kosong memperoleh 48.528 suara atau 57,98 persen.

Begitu pula pasangan bupati-wakil bupati Bangka, Mulkan-Ramadian. Keduanya kalah usai hanya meraup 50.443 suara atau 42,75 persen berbanding

57,25 persen dari perolehan suara kotak kosong.

"Saya sendiri berpendapat yang dipilih dan berhak dipilih di tempat pemungutan suara dan di dalam surat suara adalah yang telah mengikuti proses pencalonan," katanya.

Irawan mengatakan fenomena itu akan menjadi evaluasi di Komisi II DPR bersama penyelenggara pemilu dan pemerintah.

"Ke depan semua ini akan kita evaluasi secara holistik dan komprehensif, termasuk apakah mekanisme kotak kosong ini relevan," katanya.

KPU sebelumnya mencatat 41 daerah pada Pilkada serentak 2024 memiliki calon tunggal atau menghadapi kotak

kosong. Dari jumlah itu, kotak kosong mendominasi kemenangan. Beberapa daerah itu seperti Bangka, Pangkalpinang, dan Gresik.

Di Bangka, kotak kosong lebih unggul sebanyak 57,25 persen. Dari data 445 TPS yang ada di Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung, kotak kosong menang di hampir seluruh TPS dengan meraih total 67.546 suara.

Begitu pula kotak kosong di Pilwalkot Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, yang juga tercatat unggul dari pasangan calon petahana nomor urut 2, Maulan Aklil alias Molen dan Masagus M Hakim. (*)

Kemendagri Ganti Pj Wali Kota Pekanbaru yang Kena OTT KPK

Laporan: Hasim

JAKARTA- Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto memastikan Kemendagri bakal mengganti penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa yang terjerang operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

"Kemendagri segera menugaskan kepada seorang ASN pimpinan tinggi pratama menggantikan yang bersangkutan sebagai penjabat wali kota Pekanbaru agar administrasi pemerintahan tetap berjalan dan tidak



Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto.

terganggu," kata Bima, Selasa (3/12).

Sebelum menjadi Pj Wali Kota Pekanbaru, Risnandar

merupakan ASN di Kemendagri dan menjabat Direktur Organisasi Kemasyarakatan Ditjen

Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri.

Bima mengatakan Risnandar selama di

Anggota DPR Kena Sanksi Gara-gara Sebut Timnas Bukan 'Akamsi'



Majelis Kehormatan Dewan (MKD) memutuskan untuk memberikan sanksi ringan terhadap Anggota DPR Komisi X Nuroji imbas pernyataannya yang mengkritik naturalisasi Timnas Indonesia

MAJELIS Kehormatan Dewan (MKD) menjatuhkan sanksi ringan terhadap anggota DPR Komisi X Nuroji buntut kritiknya soal naturalisasi pemain Timnas Indonesia.

Ketua MKD Nazaruddin Dek Gam mengatakan sanksi itu diberikan lantaran pernyataan Nuroji dinilai memuat kalimat yang menyinggung suku, ras, agama dan antargolongan (SARA).

"Teradu Nuroji dari Fraksi Partai Gerindra terbukti melanggar kode etik DPR RI dan diberikan sanksi ringan berupa teguran tertulis," kata Nazaruddin usai sidang etik di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/12).

"Sanksinya teguran tertulis. Jadi putusan ini ditetapkan pada hari ini dihadiri semua majelis, tidak ada satupun anggota majelis yang keberatan," sambungnya.

Nazaruddin menjelaskan teguran tertulis itu sudah diberikan kepada Nuroji. Ia menyebut Nuroji juga hadir dalam sidang etik tertutup yang digelar MKD.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua MKD Agung Widyantoro menyebut Nuroji mengakui kesalahannya.

"Dari pengakuan itulah berarti teradu merasa bersalah, putusannya seperti tadi yang dibacakan yang mulia ketua," tutur dia.

Sebelumnya, Nuroji menyampaikan

pandangannya soal Timnas Indonesia ketika mengikuti rapat Komisi X DPR RI terkait naturalisasi Mees Hilgers dan Eliano Reijnders yang sedang disebut PSSI.

Anggota dari Fraksi Partai Gerindra itu mengaku pada dasarnya setuju soal naturalisasi, tapi ada hal yang dinilai mengganjal.

Ia juga menyatakan tidak terlalu bangga dengan kemenangan Timnas Indonesia lantaran mayoritas diisi oleh pemain naturalisasi.

"Ke depan harus punya strategi lain ya, saya jujur saja tidak terlalu bangga dan tidak euforia dengan kemenangan-kemenangan PSSI [Timnas Indonesia]. Karena yang main bukan 'akamsi', anak kampung sendiri," kata Nuroji, Selasa (17/9). (*)

Kemendagri termasuk pegawai yang berkinerja baik dan tidak ada catatan pelanggaran. Atas hal ini, Risnandar kemudian dijadikan sebagai Pj Wali Kota Pekanbaru.

"Evaluasi tentang kerjanya sebagai Pj Walkot Pekanbaru termasuk yang bagus," kata Bima.

Atas kasus yang menimpa Risnandar ini, Bima mengatakan Mendagri Tito Karnavian sudah sering mewantiwanti semua penjabat kepala daerah untuk tidak melakukan korupsi.

Bima meminta Risnandar bertanggungjawabkan perbuatannya sendiri jika benar telah melakukan korupsi.

"Jika Risnandar benar melakukan korupsi maka ini tindakan pribadi yang harus bertanggungjawabkan secara hukum," kata dia.

Sebelumnya KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa yang baru menjabat sekitar enam bulan pada Senin (2/12).

"Iya benar, penangkapan terhadap

Pj Walkot Pekanbaru," ujar Wakil Ketua KPK Johanis Tanak saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Senin (2/12) malam.

Mereka yang terkena OTT KPK di wilayah Provinsi Riau itu dibawa ke Mapolresta Pekanbaru untuk menjalani pemeriksaan awal. Salah satu yang digelandang ke kantor polisi itu adalah Risnandar.

Penyidik KPK membawa Risnandar ke Mapolresta Pekanbaru sekitar pukul 19.30 WIB untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. (*)

Peringati HUT ke-25 Dharma Wanita Persatuan Sultra gelar Lomba Olah Raga dan Donor Darah



Pewartu: Mashuri

SULTRA, BP- Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Dharma Wanita Persatuan (DWP) tahun 2024, Penjabat (Pj.) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., memimpin upacara pembukaan lomba olahraga dan kegiatan donor darah. Acara tersebut berlangsung di halaman Kantor Gubernur Sultra, Kamis (28/11/2024).

Pada gelar kegiatan ini hadir para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Sultra, Ketua DWP Provinsi Sultra beserta jajaran, Ketua DWP OPD, Ketua DWP

instansi vertikal, serta peserta lomba dari berbagai OPD di lingkup Pemprov Sultra.

Dalam laporannya, Ketua Panitia menyampaikan bahwa rangkaian peringatan HUT ke-25 DWP ini bertujuan untuk mempererat kebersamaan dan memberikan manfaat bagi kesehatan serta solidaritas anggota DWP. Ia juga mengapresiasi dukungan dari berbagai pihak yang memungkinkan terselenggaranya kegiatan ini dengan baik.

Adapun Tema yang diusung dalam peringatan HUT ke-25 DWP tahun ini adalah "Penguatan Fondasi Transformasi Organisasi DWP Menuju Indonesia Emas 2045". Tema ini mencerminkan komitmen DWP

dalam memperkuat peran dan kontribusi untuk mewujudkan cita-cita Indonesia yang maju dan berdaya saing di kancah global pada tahun 2045.

Beragam Lomba dan Kegiatan Sosial Dalam rangkaian acara ini, berbagai lomba digelar, antara lain penilaian papan nama DWP antar OPD dan instansi vertikal (25 November-1 Desember 2024), lomba joget balon, estafet kelereng, dan merangkai bunga. Selain itu, kegiatan donor darah akan dilaksanakan pada Jumat, 29 November 2024 di Aula Bahteramas, bekerja sama dengan RSUD Bahteramas, dengan target peserta sebanyak 76 orang.

Sekda menyam- paika apresiasi atas

eksistensi DWP yang terus berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Sebagai organisasi yang menghimpun istri ASN, DWP diharapkan terus menunjukkan keteladanan dengan integritas, moralitas, dan profesionalisme. Sekda juga menegaskan pentingnya peran DWP dalam memberikan dukungan moral kepada ASN agar semakin produktif dan berkontribusi optimal dalam pelayanan publik.

Dengan berbagai kegiatan ini, HUT ke-25 DWP tidak hanya menjadi momentum refleksi, tetapi juga memperkuat solidaritas dan peran organisasi dalam mendukung cita-cita Indonesia maju. (*)

Pj. Gubernur Sultra Melantik Ketua dan Anggota KPID Sultra serta Peluncuran Proyek Perubahan PKN Tingkat II Tahun 2024



SULTRA, BP-Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara, Komjen Pol. Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., menghadiri pelantikan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sulawesi Tenggara masa bakti 2024-2027 yang dirangkaikan dengan Peluncuran Proyek Perubahan Pendidikan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan ke-35 Tahun 2024. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Selasa (26/11/2024).

Hadir pula dalam acara ini Wakil Ketua III DPRD Sultra, Forkopimda Tingkat I Sultra, Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, pimpinan kementerian/ lembaga di Sultra, Kepala BPSDM Sultra, para peserta PKN Tingkat II, serta pejabat terkait lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Pj. Gubernur Sultra melantik tujuh anggota KPID Provinsi Sultra yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor: 100.3.3.1/404 Tahun 2024. Anggota yang dilantik adalah:

1. Fadli Sardi, S.H., M.H. (Ketua)
2. Asnawati, S. Kep
3. Hidayatullah Halib, S.H.
4. La Ode Kaharudin
5. La Ode Ramalan, S.P., M.Sc.
6. Molesara, S.I.Kom.
7. Zardoni, S.P.

Dalam sambutannya, Ketua KPID Sultra yang baru dilantik, Fadli Sardi, S.H., M.H., menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan. Ia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas penyiaran di Sultra dengan menjaga prinsip-prinsip kebangsaan, keberagaman, dan kebudayaan. "Kami siap bekerja dengan dukungan Pemprov Sultra dan seluruh pihak terkait untuk menciptakan ekosistem penyiaran yang inklusif dan berkualitas," ujarnya.

Peluncuran Proyek Perubahan PKN Tingkat II oleh Pj. Gubernur Sultra menjadi bagian penting dari acara ini. Sekda Sultra, Asrun Lio, yang juga bertindak sebagai coach dalam pelatihan ini, mengapresiasi inovasi-inovasi yang dihasilkan oleh peserta. "Proyek ini bukan puncak dari pendidikan, melainkan awal dari implementasi

nyata untuk mendorong program strategis di daerah," ungkapnya.

Pj. Gubernur Sultra dalam sambutannya menekankan pentingnya kepemimpinan yang adaptif dan inovatif. Ia juga menyampaikan enam prinsip kerja, yaitu:

1. Memahami dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan baik.
2. Menjaga komitmen moral dan pencapaian.
3. Intensif melakukan pengawasan dan evaluasi.
4. Mengantisipasi anomali dan kontinjensi.
5. Melakukan mitigasi dan pemulihan.
6. Meningkatkan citra organisasi melalui positioning, differentiation, dan branding.

Pj. Gubernur Sultra juga menekankan enam tugas utama KPID Sultra sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yaitu:

1. Menjamin akses masyarakat terhadap informasi yang akurat.
2. Mendukung pengaturan infrastruktur penyiaran.
3. Menciptakan persaingan sehat antar lembaga penyiaran.
4. Memelihara tatanan informasi yang adil dan merata.
5. Menindaklanjuti aduan pelanggaran penyiaran dari masyarakat.
6. Mengembangkan sumber daya manusia di bidang penyiaran.

Ia juga mengingatkan pentingnya pengawasan ketat terhadap lembaga penyiaran yang terindikasi terlibat dalam judi online dan memastikan konten yang disiarkan mematuhi regulasi, khususnya dalam masa tenang Pilkada serentak 2024.

Mengakhiri sambutannya, Pj. Gubernur Sultra mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berkolaborasi dalam menjaga kualitas penyiaran. "Usaha yang sungguh-sungguh tidak akan mengkhianati hasil. Ketika ada kemauan, di situ ada jalan," tutupnya dengan penuh semangat. (*)

Pj Walikota Baubau Dr Muh Rasman Manafi Pimpin Apel Siaga Netralitas, Desk Pilkada dan Satgas Pembinaan dan Pengawasan ASN

BAUBAU, BP-Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau menggelar apel siaga netralitas ASN, Desk Pilkada dan Satgas Pembinaan dan Pengawasan menjelang pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 di halaman kantor Wali Kota Baubau Palagimata Senin (25/11/2024) dipimpin langsung Pj Wali Kota Baubau Dr H Muh Rasman Manafi, SP, M.Si.

Dalam arahnya dihadapan ribuan ASN Pemkot Baubau Dr H Muh Rasman Manafi menegaskan, netralitas ASN itu sangat penting mengingat ASN memiliki tanggung jawab besar. Menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah dan demokrasi di Indonesia. Apalagi, seluruh ASN sudah menandatangani Pakta Integritas (PI) terkait dengan netralitas.

Pada kesempatan tersebut, orang nomor satu di Kota Baubau ini menyematkan tanda pengenal kepada Desk Pilkada Kota Baubau dimana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota serta berdasarkan Peraturan



Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai tugas yakni pertama melakukan Pemantauan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Daerah. Kedua, menginventarisasi dan menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada.

Ketiga, memfasilitasi penugasan personal ASN pada penyelenggara Pemilu di Tingkat Kecamatan (PPK dan Panwascam) serta di Tingkat Kelurahan (PPS). Keempat, memberikan dukun-



Pj Walikota Baubau Dr H Muh Rasman Manafi terjun langsung pastikan Pilkada di Baubau Berlangsung Damai dan lancar

gan dan fasilitasi keamanan penyimpanan logistik Pilkada di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan serta kelancaran distribusi logistik Pilkada sampai ke TPS. Kelima, memfasilitasi pembentukan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam pengamanan dan ket-

ertiban pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Keenam, memberikan dukungan fasilitas Kesehatan bagi Penyelenggara Pemilu dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Ketujuh, meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan Kepala

Daerah. Dan kedelapan, melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam mewujudkan kondisi keamanan dan ketertiban umum.

Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Surat Keputusan Bersama Menteri Pendayagu-

naan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan RB, Menteri Dalam Negeri, Kepala BKN, dan Ketua Bawaslu RI tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralisasi ASN dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah, maka tugas Pokok Satgas Binwas Netralitas ASN adalah melakukan upaya pencegahan penindakan dan monitoring serta evaluasi dalam menjaga netralitas dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai ASN dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah

Kemudian, melakukan sosialisasi per-

aturan terkait netralitas pegawai ASN dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Mengidentifikasi titik-titik rawan terjadinya pelanggaran netralitas pegawai ASN pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan yang tercantum pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah. Memfasilitasi pelaksanaan Ikrar Bersama dan Penandatanganan Pakta Integritas Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Baubau. Membentuk Tim Internal yang bertugas melakukan pengawasan terhadap netralitas pegawai ASN.

Selain itu, menerima dan meneruskan pengaduan masyarakat tentang dugaan pelanggaran netralitas pegawai ASN. Disamping itu, Menindaklanjuti rekomendasi KASN dan/atau BKN untuk melaksanakan penegakan kode etik maupun disiplin ASN berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta melakukan kerjasama dan koordinasi terkait pelaksanaan pengawasan dan pembinaan netralitas Pemerintah Kota Baubau. (ardi)

Pj Wali Kota Baubau Dr Muh Rasman Manafi Lepas Rombongan Distribusi Logistik Pilkada



Laporan: Ardi

BAUBAU, BPPenjabat (Pj) Wali Kota Baubau Dr H Muh Rasman Manafi, SP, M.Si bersama KPU Kota Baubau dan Bawaslu Kota Baubau bersama Forkompinda melepas distribusi logistik Pilkada serentak 2024, Selasa (26/11/2024).

Proses pelepasan distribusi logistik ini berlangsung di Gudang Logistik KPU Kota Baubau jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari. Distribusi logistik untuk memastikan

pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) berlangsung kondusif.

Menurut Pj Wali Kota Baubau Dr H Muh Rasman Manafi, saat ini sudah memasuki tahapan yang benar-benar membutuhkan pengawasan dari waktu ke waktu. "Tadi pak ketua KPU dan kita telah berdoa bersama semoga harapan kita negeri kita aman, damai, tentram, nyaman. Yang menyalurkan suaranya selesai pulang tenang, perhitungan berjalan serahkan kepada penyelenggara dan semoga

kita yang hadir disini tetap ingatkan lingkungan kita supaya setelah pencoblosan mau ada yang merasa menang atau merasa kalah tunggu pengumuman. Setelah begitu monggo silahkan di rayakan dengan tentu memperhatikan aturan yang berlaku jangan sampai kita euforia," ujarnya.

Ditambahkan, logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Baubau yang akan dilepas sebanyak 216 Jumlah TPS, 215 TPS itu tersebar

ke seluruh wilayah kelurahan yang ada di wilayah Kota Baubau dan 1 TPS khusus.

Orang nomor satu di Kota Baubau ini sangat berharap kepada semua dengan tugas dan fungsinya masing-masing tetap menjalin koordinasi dan di Pemerintah Kota Baubau juga telah selesai melakukan rapat untuk desk Pemilu sebagai media untuk mensupport penyelenggara Pemilu di Kota Baubau.

"Kita sangat terbuka untuk memastikan penyelenggaraan ini tentram damai negeri kita dan untuk teman-teman keamanan TNI, POLRI, teman-teman juga yang sudah hadir kita tentu sangat berharap kalau misalnya pemerintahan daerah perlu ada langkah-langkah segera disampaikan nanti kita akan support, prinsipnya apa yang menjadi tanggung jawab kita bersama kita bergandengan tangan kita jaga negeri kita," ungkapnya. (*)

Pj Wali Kota Baubau Pastikan Masyarakat Nyaman Memberikan Suara

BAUBAU, BP-Pj Wali Kota Baubau Dr H Muh Rasman Manafi, SP, M.Si saat rapat evaluasi tim Desk Pilkada 2024 di lantai dua ruang rapat kantor Wali Kota Baubau Senin (25/11/2024) ingin memastikan masyarakat Kota Baubau yang akan memberikan suaranya merasa nyaman. Oleh sebab itu, apa yang sudah dilakukan selama ini dengan komunikasi yang sudah terbangun.

"Kalau kita lakukan langkah-langkah positif, maka keadaan yang mungkin tidak kita harapkan itu, itu tidak akan terjadi. Tetapi kalau kita terlambat melakukan langkah-langkah di depan, biasanya akan ada kejadian-kejadian tambahan. Dan itu akan meminta energi waktu pikiran kita," ujarnya.

Ditambahkan, berbagai persoalan yang mungkin akan timbul ke depannya misalnya terkait dengan kelan-

caran distribusi suara, bila memerlukan perhatian secara khusus seperti masalah parkir, masalah kendaraan, masalah orang yang selalu menghalangi jalan agar dapat disampaikan saja langsung terutama yang berada di wilayah-wilayah kecamatan. Sehingga bila mengambil langkah-langkah preventif.

Dikatakan, dalam setiap 5 tahun sekali pelaksanaan Pilkada selalu ada informasi serangan fajar atau apapun namanya dan belum lagi pressure group dan informasi lainnya. Hal itu tentunya akan membuat lingkungan dan masyarakat merasa terganggu.

"Itukan informasi yang tidak benar. Tetapi karena dia beredar terus, terjaga terus, akhirnya ketidaknyamanan terjadi. Sehingga saya menghimbau ke kita semua yang di sini, itu bisa memastikan lingkungan kita,

lingkungan kerja kita, lingkungan rumah kita, itu bisa nyaman orang menyalurkan suaranya. Karena kita punya ukuran pada Pemilu Presiden dan legislatif lalu menyerahkan suara cukup baik dan nyaman di bilik suara. Kita berharap ini dipertahankan bahkan kita tingkatkan," katanya.

Orang nomor satu di Kota Baubau ini meminta perhatian kepada titik-titik lokasi yang rawan baik pada saat pemungutan suara atau pasca perhitungan suara supaya efektif dalam bergerak. "Karena ini serentak, jadi ada di kekuatan kita. Nah tolong ini di share kepada kita semua yang ada. Sehingga kalau misalnya ada sifatnya yang rahasia, silahkan di-kita. Tapi kalau sifatnya rawan, harusnya semua bisa tahu. Jadi teman-teman dari kepolisian, TNI, termasuk kepala-kepala wilayah, itu bisa disinergikan apa langkah yang mau diambil," tutupnya. (*)

Percepat Penuhi Alat Skrining Dan Diagnostik Di Puskesmas



Puskesmas tidak lagi berbasis program, tetapi dilakukan melalui kluster sesuai siklus hidup.

“Puskesmas dibagi menjadi 5 kluster yang dilengkapi oleh SDM kesehatan yang mempunyai kompetensi dan kewenangan sesuai kluster. Dengan sistem kluster, maka pengelolaan setiap sasaran siklus hidup, dapat dikelola bersama dalam kluster sehingga pelayanan

dapat diberikan lebih komprehensif dan terintegrasi,” ucap Dirjen Maria Endang Sumiwi.

Lima kluster pelayanan di Puskesmas meliputi Kluster Manajemen, Kluster Ibu dan Anak, Kluster Kesehatan Dewasa dan Lanjut Usia, Kluster Penanggulangan Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan, serta Lintas Kluster.

Maria Endang menambahkan, penata-

an struktur organisasi dan sumber daya Puskesmas telah dibagi berdasarkan kluster dan dilengkapi dengan lingkup pelayanan kegiatan serta kompetensi petugas pada masing-masing kluster.

“Kluster dipimpin oleh penanggung jawab kluster dibantu oleh pelaksana kluster. Dalam hal keterbatasan SDM, pelayanan dapat diberikan oleh petugas

dari kluster lainnya yang memiliki kompetensi dan kewenangan yang sesuai,” tambahnya.

“Kluster bertugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan, pemantauan situasi kesehatan wilayah kerja serta pembinaan teknis kepada jejaring Puskesmas sesuai dengan kelompok sasaran.” (*)

JAKARTA - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berupaya mempercepat pemenuhan kebutuhan alat kesehatan untuk mendukung implementasi transformasi layanan primer. Pemenuhan alat kesehatan ini difokuskan pada fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) primer, khususnya di Puskesmas.

Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian RI dr. Maria Endang Sumiwi, M.P.H. mengatakan, kebutuhan alat kesehatan di Puskesmas masih harus ditingkatkan, terutama untuk mendukung deteksi dini atau skrining kesehatan. Hal ini sesuai dengan peran Puskesmas dalam menjaga kesehatan masyarakat.

“Alat kebutuhan Puskesmas yang masih perlu diperbanyak terkait alat-alat kesehatan pendukung skrining seperti ultrasonografi (USG), elektrokardiografi (EKG), hematology analyzer, chemistry analyzer, dental chair,” kata Maria Endang di Jakarta, ditulis Selasa (26/11).

“Selain itu, alat kesehatan untuk diagnostik serta tindak lanjutnya, di antaranya urine analyzer, PoCT HbA1C, dan alat Tes Cepat Molekuler (TCM) juga belum semua Puskesmas memiliki alat kesehatan tersebut.”

Maria Endang juga mengatakan, salah

satu strategi untuk mendukung transformasi kesehatan melalui pilar pertama transformasi pelayanan kesehatan primer adalah meningkatkan kapasitas dan kemampuan pelayanan kesehatan primer melalui revitalisasi jejaring dan standarisasi pelayanan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu), dan Posyandu.

Peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan primer turut dilakukan melalui kunjungan rumah dalam proyek Strengthening of Primary Health Care (SOPHI).

“Proyek SOPHI bertujuan mengatasi kesenjangan antara sistem pelayanan kesehatan primer yang diakibatkan oleh fungsi preventif dalam pelayanan kesehatan primer terutama di tingkat layanan terendah, pelayanan kesehatan rujukan yang terbatas, dan layanan yang tersedia dengan kualitas yang belum memadai di berbagai daerah,” lanjut Maria Endang.

“Proyek berfokus pada perawatan primer yang diusulkan akan berkontribusi untuk menghemat biaya perawatan kesehatan yang terkait dengan pengobatan penyakit. Fokusnya terhadap tindakan pencegahan dan kuratif yang hemat biaya dan penghematan beban sosial ekonomi terkait dengan perawatan ekstra yang diperlukan untuk

penyakit yang berpotensi dapat dicegah.”

Menurut Dirjen Maria Endang, dukungan dari proyek SOPHI diharapkan mampu memenuhi kebutuhan alat kesehatan di Puskesmas, Pustu, Posyandu. Selain itu, dukungan ini diharapkan meningkatkan kapasitas tenaga medis dalam pemanfaatan alat kesehatan untuk mendukung layanan kesehatan yang lebih baik.

“Kemenkes akan memberikan pemenuhan set alat mulai tahun 2024 sampai dengan 2028 di 10.234 Puskesmas, 25.826 Puskesmas Pembantu, dan 304.420 Posyandu. Untuk batch 1 akan diberikan kepada 6.236 Puskesmas di 382 kabupaten/kota di 35 provinsi,” terangnya.

“Kemudian, untuk pemenuhan reagen kesehatan atau Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) juga dipenuhi oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.”

Pelayanan Sesuai Siklus Hidup

Puskesmas kini menerapkan paradigma baru dalam pemberian pelayanan kesehatan. Selama ini, pasien yang berobat ke Puskesmas dilayani berdasarkan penyakit atau berbasis program. Dengan adanya program Integrasi Layanan Primer (ILP), pelayanan kesehatan di

PEMERINTAH KOTA BAUBAU MENGUCAPKAN

SELAMAT MERAYAKAN NATAL DAN TAHUN BARU 2025

Dr. H. MUH. RASMAN MANAFI, S.P., M.Si	Ny. REFFIANI DWIATMO RASMAN, S.T	LA ODE ASWAD, S.Sos, M.Si	H. ANDI HAMZAH MACHMUD, S.Sos, M.Si
Pj. Walikota Baubau	Ketua TP PKK Baubau	Pj. Sekda Kota Baubau	Kadis Kominfo Baubau

Baubau Post
Kritik, Lugas, Independen

Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan dalam bentuk apa pun saat melakukan tugas jurnalistik. Dalam pelaksanaan tugas, wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post.

Segala Berita yang diterbitkan oleh Baubau Post merupakan tanggungjawab penanggungjawab Redaksi

Pemimpin Umum : Fauzan NWA
Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi : Ardi
Redpel : Hengky TA
Korlip : Hengky T.A
Redaktur : Alyakin, Kasrun
Reporter : Rahim, Mashuri, Jaya, Azis, Lisna

Layouter : Rlirin
Pracetak : Aditya
Cetak : Jamal

Penerbit : PT. Faren Grafika
Komisaris : Erna Agule
Direktur Utama : Andina Latief, SKM
Manager Keuangan : Nabila D.A
Manager Iklan dan Pemasaran : Fauzan
Kepala Sirkulasi : Jamal
Administrasi : Salvana
Security :

Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl. Raya Palagimata, BTN Palagimata, Blok K-L No. 1 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari Kota Baubau
Tlp. 0402-2814207 - Email : baubaupost2019@gmail.com
Percetakan : PT. Faren Grafika, Alamat: Jl. Raya Palagimata Blok K No 01, Kel. Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau

Kepala Biro Wakatobi : Risman
Kepala Biro Buton Utara : Fauzan
Kepala Biro Buton : Rahman
Kepala Biro Busel : Salvana
Kepala Biro Buteng : Andini
Kepala Biro Bombana :
Kepala Biro Sultra :

Kontributor Baubau : Iphul, Kontributor Sultra : Amat Jr
Kontributor Buton : Kontributor Butur : Kasrun,
Kontributor Buteng : Hengki TA, Kontributor Busel : Amirul

Baubau : Jaya
Agen Pasarwajo :
Agen Butur : Samrihan

Harga Langganan : Dalam Kota Baubau Rp. 100.000,-/ bulan,
Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim,
Eceran Dalam Kota Baubau : Rp.5.000,-

Anggota DPR Angkat Wacana Polisi Pakai Pentung Gantikan Senjata Api



Ilustrasi. Anggota Komisi III DPR mengangkat wacana anggota Polri hanya membawa alat pentung untuk menggantikan senjata api.

Pewartu: Alwan

JAKARTA- Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP I Wayan Sudirta berbicara soal wacana anggota Polri hanya dibekali pentung atau kayu pemukul sebagai senjata. Hal ini buntut sejumlah kasus penyalahgunaan kasus senjata api oleh anggota polisi.

Menurut Wayan, saat ini publik mulai mempertanyakan apakah polisi masih perlu membawa senjata api.

"Yang paling meropotkan kami adalah dalam waktu 1-2 hari ini, Pak, orang mulai mengusik senjata yang dipegang polisi. Mulai diusik apa masih perlu kepolisian pegang senjata?" kata Wayan dalam rapat dengan jajaran

Polrestabes Semarang dan Polda Jawa Tengah, di Komisi III DPR, Jakarta, Selasa (3/12).

Ia pun mengatakan polisi perlu membuktikan bahwa anggotanya masih layak memegang senjata api. Wayan meminta Polri bisa mengevaluasi kelemahan prosedur operasional standar (SOP) yang berkaitan dengan penggunaan senjata api.

"Bisa Bapak gambarkan enggak di mana kelemahan SOP yang berkaitan dengan senjata, sampai senjata itu dengan mudah yang harusnya melindungi rakyat, tapi malah maaf ya, bukan hanya membunuh rakyat, tapi bisa membunuh polisi," ujarnya.

Wayan kemudian

mengatakan di berbagai negara maju, anggota polisi cukup membawa alat pentung. Ia berpendapat hal ini bisa dikaji, sehingga bisa diterapkan di Indonesia.

"Ini hati-hati karena kajian, walaupun belum berupa undang-undang, kajian yang ada tentang bagaimana polisi cukup bermodalkan pentungan di berbagai negara maju. Kelihatannya perlahan tapi pasti kita akan mengarah ke sana. Berikan gambaran kepada kami betapa pentingnya senjata itu dipegang," ujar dia.

Kasus dugaan penyalahgunaan senjata api yang melibatkan anggota polisi muncul dalam beberapa waktu terakhir.

Di Solok Selatan, Sumatera Barat, Ka-

bag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Riyanto Ulil Anshar. Korban meninggal dunia.

Kapolda Sumatera Barat Irjen Suharyono mengatakan peristiwa itu diduga karena Dadang tidak terima terhadap penegakan hukum yang dilakukan korban terhadap tambang-tambang ilegal di Solok Selatan.

Kemudian di Semarang, Jawa Tengah, seorang anggota bernama Aipda Robig Zaenuddin menembak Gamma Rizkynata Oktafandy (17), siswa SMKN 4 Semarang, karena kendaraannya sempat dipepet di jalan. Gamma meninggal dunia akibat tembakan itu. (*)

Polisi Klaim Gangster Semarang Terima Uang dari Situs Judi Online

Pewartu: Alwan

JAKARTA-Polisi mengungkap bahwa sejumlah kelompok gangster di Semarang turut mendapat uang pembiayaan dari situs judi online untuk aktivitas mereka.

Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar menyebut bahwa uang itu didapatkan lewat endorsement yang dilakukan pada gangster tersebut di grup-grup mereka.



Uang itu kemudian digunakan untuk aktivitas seperti menyewa vila, membeli miras, termasuk

membeli senjata tajam.

"Jadi uang itu kemudian dari situs judi online ada bar-

ternya. Jadi mereka harus mengendorse itu ke grup-grup mereka untuk mendapatkan biaya," kata

KPK Periksa 8 Saksi di Kasus Pemerasan Eks Gubernur Bengkulu



Petugas menggiring Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah (depan, kedua kiri).

Laporan: Hadi

JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa delapan orang saksi untuk mendalami permintaan pengumpulan uang untuk pemenangan Calon Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah.

Para saksi tersebut diperiksa di Kantor Polresta Bengkulu pada Senin (2/12).

"Saksi didalami terkait dengan pertemuan-pertemuan perihal permintaan dari Gubernur RM untuk menjadi tim pemenangan dirinya dan pendalaman terkait permintaan pengumpulan dana untuk pemenangan gubernur RM," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Selasa (3/12).

Delapan orang saksi tersebut ialah Kepala Biro Umum Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu Alfian Martedy; PNS/Plt. Kepala Bapenda Provinsi Bengkulu Yudi Karsa; PNS/Kadis ESDM Provinsi Bengkulu Doni Swabuana; dan PNS/Kadis TPHP

Provinsi Bengkulu M. Rizon.

Kemudian PNS/Kepala BPKAD Provinsi Bengkulu Haryadi; PNS/Kadis Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Syafrandi; PNS/Kepala Biro Pemkesra Provinsi Bengkulu Ferry Erne Pare-ra; dan PNS/Kadis Pendidikan Pemprov Bengkulu Saidirman.

Dalam Pilgub Bengkulu tahun 2024, Rohidin yang berpasangan dengan Meriani melawan pasangan Helmi Hasan-Mi'an. Helmi Hasan merupakan adik dari Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.

Hasil perhitungan cepat menunjukkan Rohidin-Meriani kalah dari lawannya.

Adapun Rohidin bersama dua orang lainnya yakni Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Isnan Fajri dan aju-dan gubernur Evri-ansyah alias Anca ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan peneri-

maan gratifikasi.

Mereka sudah ditahan untuk waktu 20 hari pertama hingga 13 Desember 2024 di Rutan Cabang KPK, dijerat dengan Pasal 12 huruf e dan Pasal 12B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 KUHP.

Lima orang lainnya yang sempat ditangkap KPK diputuskan untuk dilepas karena berstatus sebagai terpe-riksa atau saksi.

Mereka ialah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Bengkulu Syarifuddin, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Bengkulu Syafrandi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Saidirman, Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Provinsi Bengkulu Ferry Ernest Parera, serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu Tejo Sur-

oso. (*)

Irwan dalam rapat di Komisi III DPR, Selasa (3/12). Rapat ini membahas soal kasus siswa SMKN Semarang yang tewas ditembak polisi.

"Nah uang ini digunakan untuk membeli sajam, kemudian membeli miras. Kemudian menyewa vila untuk rekreasi," imbuhnya.

Rapat itu sekaligus membahas kasus penembakan seorang

siswa SMKN 4 Semarang hingga tewas berinisial GRO (17) oleh aparat kepolisian.

Pada kesempatan itu, Irwan juga mengungkap bahwa gangster adalah istilah yang diberikan mereka sendiri. Menurut dia, di Semarang ada beberapa kelompok remaja yang menamakan dirinya gangster.

Sekitar 1,5 bulan lalu, mereka sempat

berjanji akan membubarkan diri. Namun, faktanya itu tak dilakukan hingga pecah kasus penembakan terhadap GRO.

"Sebagian dari mereka ini 1,5 bulan lalu sudah menyatakan mau membubarkan diri melalui kegiatan mitigasi yang kita laksanakan terhadap remaja-remaja di kota Semarang," katanya. (*)

Bawaslu Baubau Ciptakan Pengawasan Pilkada Bersih, Jujur, dan Adil

BAUBAU, BP - Dari mulainya tahapam hingga hari pemilihan kepala daerah (Pilkada), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Baubau, terus berupaya untuk memaksimalkan peran pengawasan partisipatif dalam rangka menciptakan Pilkada yang bersih, jujur, dan adil.

Salah satunya, mulai dari melakukan pengawalan pada tahapan pendaftaran calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau tahun 2024, yang dilaksanakn 27 -29 Agustus, di Kantor KPU Kota Baubau.

Hingga, terus aktif melakukan pengawasan sebagai upaya pencegahan terjadinya pelanggaran. Adapun upaya yang dilakukan, pencegahan selama tahapan kampanye berlangsung. Menyampaikan himbauan-himbauan kepada

masyarakat dan juga kepada pihak yang dilarang untuk



Ketua Bawaslu Baubau Sarmin

ikut terlibat dalam politik praktis.

Sebelum memasuki pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara Pemilihan tahun 2024 tingkat Kota Baubau, Bawaslu menggelar Apel Siaga masa tenang, pengawasan tahapan masa tenang.

Hal tersebut, untuk memastikan semua aktivitas, semua proses kampanye tidak ada lagi di masa tenang itu. Sehingga, Ketua Bawaslu Baubau, Sarmin meminta kepada jajaran Panwascam hingga PTPS untuk mengkonfirmasi kegiatan yang melibatkan banyak orang atau aktivitas kumpul-kumpul dengan menggunakan atribut, gambar, dan simbol Paslon.

“Semua kegiatan harus terkoordinasi dengan Panwas. Termasuk kegiatan penguatan kepada saksi-saksi Paslon, kami sudah berkoordinasi dengan Pengawas sehingga kita bisa

ketahui ini aktivitas kampanye atau yang lainnya,” jelasnya.(*)

Bawaslu Baubau Perkuat Kapasitas Panwascam Dalam Penyelesaian Sengketa

Mengenai proses penyelesaian sengketa dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Baubau tahun 2024. Bawaslu Kota Baubau memperkuat kapasitas jajaran Panwaslu Kecamatan.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Bawaslu Baubau, Muh. Syahrans mengatakan dengan penguatan kapasitas atau pelatihan ini jajaran Panwascam dapat

menghadapi penyelesaian sengketa. Terutama Pe-

nyelesaian Sengketa Acara Cepat yang secara langsung ditangani oleh Panwaslu Kecamatan.

Bawaslu juga memastikan agar jajaran Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Desa/Kelurahan (PKD) ru-

tin melakukan patroli pengawasan di wilayahnya masing-masing. Meskipun saat itu tidak ada penyampaian adanya kegiatan kampanye.

“Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Desa/Kelurahan (PKD) harus memastikan tidak ada kegiatan kampanye gelap atau kegiatan kampanye yang dilaksanakan di luar dari jadwal yang telah ditetapkan. Termasuk mencegah adanya potensi bagi-bagi uang

oleh tim Paslon,” ujarnya. Muh. Syahrans berharap, Ke-

pala Sekretariat (Kasek) Panwaslu Kecamatan di tiap Kecamatan terus memberikan dukungan terhadap kerja-kerja Panwaslu Kecamatan. Sehingga setiap kegiatan dapat berjalan dengan lancar, mengingat tingkat kerawanan Pilkada di Kota Baubau masuk dalam kategori tinggi.(*)



Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Bawaslu Baubau Muh. Syahrans

Money Poltik dan Netralitas ASN Jadi Fokus Utama Pengawasan Bawaslu Baubau

BAWASLU Baubau terus aktif melakukan pengawasan sebagai upaya pencegahan terjadinya pelanggaran. Adapun upaya yang dilakukan, pencegahan selama tahapan kampanye berlangsung. Menyampaikan himbauan-himbauan kepada masyarakat dan juga kepada pihak yang dilarang untuk ikut terlibat dalam politik praktis.

Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas (HP2H) Bawaslu Baubau, Almin saat dikonfirmasi mengatakan, kegiatan yang dibuat dalam segemen, netralitas ASN dan isu money Politik. Dimana, Money politik jadi isu topik utama.

Oleh karena itu, dengan semakin banyak melibatkan kelompok, komunitas dan elemen masyarakat, akan menjadi sesuatu yang dapat menekan angka dugaan adanya pelanggaran. Agar, semakin banyak yang memantau, mengawasi, setiap pola yang disampaikan para pasangan calon hingga timnya.

“Semakin banyak yang mengawasi mereka, semakin banyak yang memantau, semakin bagus menekan dugaan adanya dugaan pelanggaran,” tuturnya. Selain itu, terkait netralitas ASN, pi-

Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas (HP2H) Bawaslu Baubau Almin

ASN di awal masa kampanye, satu kasus namun kita limpahkan ke Provinsi, sebab berkaitan dengan pasangan calon gubernur dan beberapa kasus lainnya masih dalam sementara proses tahapan penanganan bawaslu Baubau,” ungkapnya.(*)



Sosialisasi pengawasan pemilihan secara tatap muka terkait peta kerawanan pada pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Baubau tahun 2024



Pengawasan Pendaftaran Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Baubau



Apel Siaga Pengawasan Masa Tenang